

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk menimbulkan terjadinya perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kondisi tersebut maka pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menjamin tercapainya pemerataan terutama dalam aspek kesejahteraan agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat signifikan. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, sehat, dan bahagia. Perihal pemenuhan kesejahteraan ini telah diamanatkan pada mukadimah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea empat yang menyiratkan Pemerintah Indonesia berkewajiban memajukan kesejahteraan umum.

Dengan segala potensi yang ada, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, hal ini sejalan dengan konsep Indonesia sebagai negara berprinsip kesejahteraan atau dengan istilah *welfare state*, yaitu suatu haluan yang berpandangan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam menciptakan kesejahteraan warga negara, seperti yang disampaikan Husodo (dalam Triwibowo, 2006, hlm. 15) bahwa “negara kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya”. Negara kesejahteraan berpatokan pada sebuah corak ideal pembangunan yang ditekankan pada peningkatan kesejahteraan melalui pelimpahan peran penting kepada negara dalam mengurus pelayanan sosial secara universal dan komperhensif kepada warganya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan serta pemenuhan kesejahteraan dan sosial warga. Hal lain berkenaan dengan konsep negara kesejahteraan, terutama di Indonesia diperkuat oleh pernyataan Effendi (2017, hlm. 172) bahwa “dalam negara modern atau negara kesejahteraan, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, untuk itu

pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya”.

Luasnya wilayah Indonesia merupakan salah satu tantangan pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan secara adil, menyeluruh dan tepat sasaran, oleh sebab itu tugas ini bukan hanya menjadi tanggungan salah satu pihak saja, tetapi menjadi agenda yang perlu diselesaikan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat agar permasalahan yang ada dapat diatasi bersama. Dengan demikian, nilai kesejahteraan adalah bagian dari beragam nilai yang perlu dikembangkan dalam sendi-sendi aktivitas di lingkungan masyarakat hingga negara guna terciptanya kesinambungan antara pemerintah dan warga negaranya.

Darmodihardjo (dalam Hamzah, 2016 , hlm. 34) mendefinisikan “nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi manusia baik jasmani maupun rohani. Dari definisi singkat tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa nilai memiliki sesuatu yang berguna dan dapat bermanfaat bagi jasmani ataupun rohani”. Pendapat lainnya mengenai nilai, terperinci dijelaskan oleh Hamzah (2016, hlm. 34) bahwa “nilai adalah sesuatu yang sangat berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai artinya bahwa sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia”.

Lebih lanjut Joesoef (2001, hlm. 206) membagi kategori nilai tersebut menjadi dua perspektif, nilai dapat *tangible* yaitu berupa atau berbentuk jadi dapat dilihat, dan nilai bisa pula *intangible* tidak berwujud fisik, jadi tidak terlihat atau terjamah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil inti terkait pengertian nilai bahwa nilai bukan hanya hal yang dapat dilihat, tetapi hal yang tidak berwujud tetapi keberadaannya dapat dirasakan.

Secara umum ketika orang berbicara mengenai sejahtera atau kesejahteraan, merujuk pada terciptanya kehidupan yang bahagia dan sentosa, serta terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup. Sejahtera diartikan sebagai keadaan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok secara jasmani ataupun rohani, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera berarti aman sentosa , makmur , dan selamat terlepas dari segala macam gangguan. Selengkapnya pengertian kesejahteraan ini di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat,

kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari beberapa definisi di atas terdapat unsur pokok yang membangun terciptanya makna sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup yang dapat berupa material dan spiritual. Kebutuhan material menyangkut hal terkait pangan, sandang dan papan. Sedangkan kebutuhan spiritual berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan bahagia.

Paradigma yang menganggap bahwa kesejahteraan ini semata-mata hanya menjadi urusan pemerintah saja nyatanya harus dihilangkan, sebab dalam mencapai tingkat kesejahteraan itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif mendukung pemerintah. Justru dalam pelaksanaannya pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi fasilitas kesejahteraan, melalui kebijakan-kebijakan, program kesejahteraan, bantuan-bantuan khusus dan fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh setiap warga negara. Peran serta warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan tersebut. Dalam hal ini, setiap warga negara harus mampu memaksimalkan perannya dalam menjalankan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Situasi di atas mencirikan adanya konsepsi kewarganegaraan republik yang menekankan pada keterlibatan individu dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara berkenaan dengan masalah publik. Hal serupa dikatakan oleh Dagger (2002, hlm. 147) bahwa “kewarganegaraan republikan memerlukan komitmen terhadap kebaikan bersama (*Common Good*) dan partisipasi aktif dalam urusan-urusan publik”.

Lebih lanjut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat peran warga negaranya melalui penanaman nilai-nilai kesejahteraan guna terciptanya kehidupan yang layak dan sentosa. Selain melalui pembelajaran formal khususnya di sekolah melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pengembangan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan atau program yang merupakan wujud perluasan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sosial kemasyarakatan.

Sejatinya Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya menyangkut pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa di sekolah saja, tetapi secara luas Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sarana di luar lingkungan persekolahan untuk membentuk warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bermula dari asal-usul Pendidikan Kewarganegaraan yang bersumber dari ilmu kewarganegaraan (*civics*), hal ini diperkuat oleh pendapat Somantri (2001, hlm. 276) yang menyatakan bahwa “sebagai ilmu, *civics* mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dihubungkan bahwa hubungan warga negara dan lingkungan yang berada di sekitarnya, hal ini terkait lingkungan kemasyarakatan, kehidupan perekonomian, lingkungan sosial, keagamaan, kebudayaan serta cakupan kenegaraan. menjadi entitas keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Sehingga apabila merujuk kepada pengertian diatas, maka Pendidikan Kewarganegaraan dapat pula diimplementasikan di lingkungan kemasyarakatan. Sebab, hakikatnya Pendidikan Kewarganegaraan yang didedahkan di sekolah pun, siswa diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik serta mampu menyesuaikan dirinya di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait dengan hal ini, Purwasih (2014, hlm. 4) menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang strategis dan penting dalam membina peserta didik secara khusus dan masyarakat pada umumnya, agar memiliki keterlibatan terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya.”

Keterlibatan warga negara dalam aspek kesejahteraan merupakan bagian dari perwujudan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan pengamatan lapangan yang selama ini dialami oleh peneliti, didapati masyarakat masih bergantung kepada Pemerintah dalam pemecahan masalah kesejahteraannya, masyarakat masih pasif dan hanya mengandalkan bantuan Pemerintah berupa bantuan secara materil, sehingga nilai-nilai nonmaterial yang berusaha Pemerintah kembangkan masih belum terlaksana secara maksimal. Padahal, dalam meningkatkan

taraf kehidupannya bukan hanya tugas Pemerintah semata, tetapi harus disertai usaha yang seimbang dari dalam diri masing-masing.

Kesejahteraan keluarga dapat dijadikan salah satu titik acuan tercapainya tingkat kesejahteraan yang merata di Indonesia. Sebab keluarga merupakan satuan kelompok terkecil yang membentuk masyarakat itu sendiri. Menurut Sunarti (2006, hlm. 4) “kesejahteraan keluarga sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan”.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka keluarga prasejahtera di Indonesia pada bulan Januari 2019 berkisar 9,66% menurun dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa dalam perjalanannya dari tahun ke tahun tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia mulai meningkat. Sejalan dengan data secara nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mencatat penurunan persentase keluarga prasejahtera di Provinsi Jawa Barat pada angka 7,25% menurun 0,25% dari tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Persentase Keluarga Prasejahtera Provinsi Jawa Barat**

Tahun	Persentase Keluarga Prasejahtera
2017	7,83%
2018	7,45%
2019	7,25%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2019)*

Selanjutnya, peneliti tertuju pada salah satu kabupaten di Jawa Barat yang juga berhasil menurunkan persentase angka keluarga prasejahtera adalah Kabupaten Bandung Barat, dikutip dari Kurnia (2019) bahwa “ angka keluarga prasejahtera berada pada kisaran 10% dengan rincian 54.000 kepala keluarga dari 540.000 kepala keluarga hal ini disampaikan oleh Bupati Bandung Barat, angka ini pun menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Namun, berbanding terbalik dengan hasil persentasi keluarga prasejahtera tersebut, secara khusus peneliti menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 memuat data tentang masalah kesejahteraan cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun angka keluarga prasejahtera justru menurun. Runtutan permasalahan kesejahteraan keluarga di Jawa Barat pun terakumulasi menjadi beberapa kasus, diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), angka perceraian, kesehatan, dan pembangunan gender. Jumlah kasus mengenai permasalahan tersebut diantaranya tercatat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2019**

Perkara	Jumlah Kasus Terlapor
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1459 Kasus

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)*

**Tabel 1.3 Angka Cerai Gugat di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2019**

Perkara	Jumlah
Cerai Gugat	78.286 Kasus

*Sumber : Si-Kabayan Pengadilan Agama Jawa Barat (2019)*

**Tabel 1.4 Prevalensi Stunting di Jawa Barat**

Kasus	Persentase
Stunting	38%

---

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (2019)*

---

**Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat Tahun 2018**

Kasus	Persentase
Indeks Pembangunan Gender	70%

---

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)*

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka permasalahan kesejahteraan tersebut agar berkurang setiap tahunnya seperti yang ditargetkan dalam tabel penetapan indikator kerja dibawah ini.

**Tabel 1.5 Penetapan Indikator Kerja Daerah**

Indikator/ Target	Kondisi	Target	Target
	2018	2019	2023
Keluarga Prasejahtera	1.059.489	1.007.340	823.181

---

*Sumber : Pemprov Jabar , 2019*

---

Untuk dapat menekan angka permasalahan kesejahteraan tersebut, selain melalui bantuan-bantuan secara materil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha memecahkan permasalahan tersebut melalui kebijakan-kebijakan lainnya yang hasilnya dapat dirasakan bersama-sama, sebab kebijakan publik bukan hanya berkaitan dengan hal yang menguntungkan pemerintah saja, tetapi kebijakan publik mengatur kehidupan bersama segala komponen kenegaraan termasuk pemerintah dan warga negaranya, hal ini disampaikan oleh Dwidjowidjoto (2006, hlm. 25) bahwa “kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur masalah kehidupan bersama”. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

Salah satu cara yang terus pemerintah tempuh terkait dengan pengembangan nilai-nilai kesejahteraan itu adalah dengan dilaksanakannya berbagai program terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rosmaladewi (2019, hlm.30)

Agung Rusmana, 2021

**PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu.

pemberdayaan masyarakat adalah “pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek dengan mengaktualisasikan semua potensi dan budaya lokal, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hasil pembangunan selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat”.

Selama ini dalam pandangan masyarakat atau budaya lokal yang menganut sistem patriarki, sehingga menempatkan laki-laki sebagai gender terpenting dalam masyarakat, turut serta mempengaruhi pandangan bahwa kesejahteraan keluarga merupakan pertanggungjawaban dari seorang laki-laki sebagai kepala keluarga atau suami atas dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga. Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini sudah lumrah dan diterima oleh masyarakat sehingga segala bentuk keadaan rumah tangga, termasuk kesejahteraannya bergantung pada laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga, padahal seorang perempuan memiliki kesempatan setara sebagai warga negara yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Dari penjelasan di atas munculah suatu kebutuhan terkait kesetaraan gender antara suami dan istri. Bahwasanya kesetaraan gender diperlukan dalam menangani permasalahan kesejahteraan keluarga. Sehingga, salah satu usaha yang lebih spesifik dalam pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Indonesia pada umumnya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada khususnya berupaya untuk memberikan fasilitas dalam mengembangkan potensi seorang wanita melalui pemberdayaan perempuan dengan berbagai program yang dihadirkan. Sesuai dengan kalimat operasionalnya, “pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan” (Suyono dalam Ruslan, 2010, hlm. 92).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, salah satu bentuk program pemberdayaan perempuan yang dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (selanjutnya disebut Sekoper



Cinta). Seperti yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat bahwa program ini merupakan sarana perempuan guna berkumpul membentuk suatu komunitas, korelasi, hubungan, berbagi wawasan serta pengalaman. Program ini juga menjadi sarana untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan perempuan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Dalam program ini penguatan peran perempuan, khususnya ibu rumah tangga mengacu kepada pelatihan yang diatur oleh modul dasar yang mengulas enam pembahasan, di antaranya pembangunan keluarga bahagia, kecakapan dasar perempuan, kesehatan dan gizi keluarga, potret diri perempuan, dan penanggulangan bencana.

Penamaan Sekolah Perempuan ini mengingatkan pada sejenis sekolah-sekolah perempuan pada masa lalu, misalnya *Sakola Kautamaan Istri* yang dicetuskan oleh Raden Dewi Sartika, perbedaannya terletak pada visi dan misi yang diwujudkan. Pada masa lalu *Sakola Kautamaan Istri* ini merupakan sarana pendidikan formal sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat kaum wanita terutama di bidang pendidikan. Sedangkan, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) yang dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebetulnya bukanlah sebuah sekolah formal yang memiliki gedung fisik untuk pembelajarannya, melainkan adalah nama dari sebuah program pemberdayaan perempuan, dan tujuannya pun bukan lagi sebagai wujud emansipasi perempuan, tetapi lebih mengacu kepada pemberdayaan perempuan di era modern terutama dalam hal peningkatan keterampilan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai kesejahteraan keluarga.

Program ini memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada Ibu Rumah Tangga sehingga dapat memaksimalkan potensinya sebagai warga negara yang memiliki keterampilan dan keahlian terutama dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarganya. Selanjutnya apabila hal ini dikaitkan dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan tentunya berkaitan, terutama berkenaan dengan komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya adalah *civics skills* atau keterampilan kewarganegaraan yang merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan

keterampilan partisipasi. Keterampilan menemukan solusi terhadap problematika sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik adalah wujud keterampilan kewarganegaraan yang dapat dihubungkan dengan kemahiran berkontribusi dalam lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa hingga bernegara, yang pada akhirnya bermuara pada penciptaan masyarakat madani (*civil society*).

Sesuai dengan pengamatan peneliti yang telah dilakukan terhadap implementasi program Sekoper Cinta di Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, program ini merupakan wujud penanaman keterampilan warga negara terutama ibu rumah tangga untuk ikut serta memajukan dan meningkatkan kesejahteraan khususnya kesejahteraan keluarga melalui kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang keahliannya dalam berpartisipasi aktif membangun kemajuan bangsa dan negara.. Berdasarkan data dari DP3AKB Provinsi Jawa Barat, sejak peluncuran program ini telah meluluskan 2.700 peserta yang tersebar dari 100 desa di seluruh Jawa Barat, terhitung sejak Desember tahun 2018. Secara lebih spesifik berdasarkan fokus lokasi prapenelitian yang dilaksanakan di Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, peneliti mendapati program tersebut dilaksanakan sejak bulan Januari tahun 2019 dan telah menyasar 100 perempuan atau ibu rumah tangga.

Terpilihnya Desa Galanggang sebagai lokasi dilaksanakannya program tersebut disebabkan karena jumlah keluarga prasejahtera di lokasi tersebut terbilang cukup banyak di bandingkan dengan desa lainnya di Kabupaten Bandung Barat, selain itu masalah kesejahteraan lainnya seperti ketahanan keluarga, angka perceraian, kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan keterampilan warganegara masih perlu dikembangkan di lokasi ini. Sehingga Pemerintah berusaha untuk memberikan sarana peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi keluarga yang menjadi sasaran program tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarganya terutama berkaitan dengan perekonomiannya. Keberhasilan program ini dapat ditandai dengan peningkatannya taraf kesejahteraan keluarga yang bersangkutan dari sebelum program dan sesudah

program ini dilaksanakan, hal yang paling menonjol adalah adanya peningkatan kualitas perekonomian dan ketahanan keluarga.

Apabila hal ini dikaitkan dengan lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, maka program tersebut merupakan upaya dalam mengoptimalkan *social welfare* atau kesejahteraan sosial. “Dimana kesejahteraan sosial ini dapat terjadi apabila keluarga, komunitas, dan masyarakat, mengalami derajat kesejahteraan (*welfare being*) yang tinggi”. (Aryo & Lubis, 2014, hlm. 2). Program sejenis ini juga dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan *economic civics*. Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 12) memberikan pengertian mengenai *economic civics* “merupakan upaya warga negara untuk meningkatkan kesejahteraannya, hidup hemat dan tidak boros, serta dapat menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Dari serangkaian latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengulas topik mengenai **“Pengembangan Nilai-nilai Kesejahteraan Keluarga dalam Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (Studi Kasus Terhadap Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita di Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)”** hal ini menjadi layak untuk dikaji lebih dalam guna mengetahui pola penanaman nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui program yang ditargetkan dapat membina warga negara dengan sarana Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat guna tercapainya tingkat kesejahteraan yang layak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi maka peneliti memfokuskan penelitian pada hal sebagai berikut ini.

1. Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dalam mengembangkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan?
2. Apakah hasil yang diraih dari implementasi program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dalam mengembangkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan?

3. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita?
4. Apakah hambatan dan upaya yang muncul dalam implementasi program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dalam mengembangkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui pengembangan nilai-nilai kesejahteraan keluarga dalam Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (Studi Kasus Terhadap Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita di Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat).

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus secara lebih rinci adalah sebagai berikut ini.

1. Mengetahui pelaksanaan program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dalam mengembangkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.
2. Mengkaji hasil yang diraih dari implementasi program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dalam mengembangkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.
3. Mengetahui proses internalisasi nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui program Sekolah Perempuan capai Impian dan Cita-cita.
4. Mengidentifikasi hambatan dan upaya yang muncul dalam implementasi program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dalam mengembangkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Segi Teoritis**

Segi teoritis pendalaman ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah rekognisi pemahaman serta memperluas sumbangsih berupa embaran melalui bahan

dan juga bukti yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini bermanfaat dalam mengidentifikasi dan mengkaji peran lembaga pemerintah melalui pelaksanaan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) untuk mengembangkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga dalam Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan, selain itu dapat memberikan sumbangsih terhadap evaluasi kebijakan publik Pemerintah Setempat. Apabila dikaitkan dengan ruang lingkup keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, peneliti berupaya memberikan peranan terhadap pendalaman beberapa studi keilmuan yang berkaitan seperti Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan Daerah, dan juga terkait kesejahteraan warga negara.

#### **1.4.2 Segi Kebijakan**

Dengan adanya penggalan topik ini dimaksudkan agar memperoleh investigasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai laporan sederhana terhadap implementasi program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita di Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat sebagai fokus penelitian. Kriteria keluarga sejahtera dapat diupayakan melalui pengembangan esensi kesejahteraan keluarga tersebut.

#### **1.4.3 Segi Praktis**

Manfaat praktis dari penelusuran masalah ini agar membantu penyelenggara dan pihak lain yang terlibat untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Program Sekoper Cinta. Selain itu, praktis lainnya, bermanfaat baik langsung dan juga tersirat dalam aktivitas keseharian, diantaranya adalah sebagai berikut ini.

- 1) Bagi mahasiswa, studi ini diupayakan menyumbangkan buah pikir sebagai pangkal wawasan serta mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dalam memantau kebijakan pemerintah.
- 2) Bagi pemerintah, dapat membantu dalam penyusunan laporan serta evaluasi terkait dengan pelaksanaan program kerjanya.
- 3) Bagi masyarakat, menjembatani Ibu Rumah Tangga dalam penggalan wawasan perihal pentingnya mengoptimalkan nilai-nilai kesejahteraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat melalui program yang telah dicetuskan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

keluarga di Kabupaten Bandung Barat melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita.

- 4) Bagi peneliti, diharapkan membuka buah pikir, gagasan, dan pengamatan terhadap perluasan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat terutama terkait dengan nilai-nilai kesejahteraan.

### **1.5. Struktur Sistematika Skripsi**

Pengorganisasian suatu penelitian harus memenuhi unsur yang sistematis dan terstruktur. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka bagian penyusun dalam skripsi ini diawali oleh lembaran judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar originalitas skripsi dan plagiarisme, lembar ungkapan terimakasih, nama jelas serta susunan tim pembimbing, kata pengantar, kemudian berurutan dari abstraksi, susunan daftar isi, daftar skema, tabulasi, atau sejenisnya, daftar citra atau gambar, badan skripsi, daftar rujukan dan lampiran. Adapun rincian mengenai sistematika penulisan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut ini.

#### **1) BAB I : Pendahuluan**

Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan susunan sistematika skripsi menjadi pembuka dalam penulisan skripsi ini, sebab kedudukan Bab I (satu) sebagai bab pendahuluan dalam sebuah skripsi.

#### **2) BAB II : Kajian Pustaka**

Susunan bagian ini menyajikan dukungan serta landasan teori, gagasan pakar keilmuan sebagai tinjauan materi guna memberikan pondasi yang tepat terhadap persoalan penelitian yang dialami.

#### **3) BAB III : Metode Penelitian**

Isi bagian bab III ini, peneliti merancang skema penelitian yang diawali oleh penerapan pendekatan penelitian, penggunaan instrumen, langkah pengumpulan data, sampai pada pengolahan serta analisis data. Dengan adanya prosedur ini, maka penelitian bersifat akurat dan nyata dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### **4) BAB IV : Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian ini menyajikan 2 (dua) pokok bahasan. Pertama, berkenaan dengan pengolahan dan analisis data dari hasil penelusuran penelitian dengan beragam

probabilitas bentuk sejalan dengan rangkaian rumusan masalah dan kemudian hasil temuan tersebut diulas secara rinci melalui pembahasan untuk menemukan jawab atas topik yang telah dibatasi dan ditentukan sebelumnya.

#### 5) BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Penutup dalam skripsi ini menyajikan refleksi berupa simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan inferensi dan penangkapan paham peneliti mengenai final analisis temuan penelitian serta menganjurkan ihwal penting yang dapat diambil manfaatnya dari hasil penelitian yang dilakukan.